



Rp84 Miliar untuk Entaskan Kemiskinan

■ Pemkot-Yogya Targetkan-Penurunan Hingga 7,1 Persen

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mematok target penurunan angka kemiskinan di angka 7,1 persen pada penghujung 2022 mendatang. Pemkot pun akan menggelontorkan APBD sebesar Rp84.281.675.424 untuk program pengentasan kemiskinan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono, menyampaikan, dibutuhkan kerja keras, untuk menekan angka kemiskinan dari 7,69 persen menjadi 7,1 persen.

"Jadi, itu alokasi APBD untuk program penanggulangan kemiskinan tahun 2022 yang terdiri dari APBD Kota Yogya sebesar Rp84.281.675.424, ditambah APBD DIY sebesar Rp483 juta," ungkapnya. Selasa (23/8).

Agus pun menegaskan, upaya pengentasan kemiskinan jelas tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah saja, tanpa upaya kolaboratif dari pemangku kebijakan lain. Alhasil, anggaran *Corporate Social Responsibility* dari deretan perusahaan turut dilibatkan untuk pemulihan ekonomi.

"Dari program CSR sampai semester dua 2022 ini sudah terealisasi sebesar Rp5.704.361.775, dengan 73,86 persen merupakan intervensi terhadap langkah pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta," ujarnya.

Sinergitas Pemkot Yogya dan perusahaan, melalui Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

(TSLP) sejauh ini sudah direalisasikan dengan berbagai kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut, kata Agus, muaranya adalah untuk mendukung pengentasan kemiskinan.

Antara lain, bantuan sosial, mulai dari sembako, santunan anak yatim, perbaikan rumah yang tidak layak huni, serta beasiswa untuk siswa tak mampu. Kemudian, ada juga pelatihan ketrampilan UMKM yang melibatkan warga kurang mampu dan dukungan terhadap ungkitan pembangunan, lewat pembuatan fasilitas umum, ataupun peningkatan sarpras," imbuh Agus.

Bak memperoleh angin segar, seiring berjalannya waktu, tingkat partisipasi perusahaan, dalam upaya pengentasan kemiskinan terus meningkat. Fenomena tersebut, tentu mendorong optimisme Pemkot Yogya, untuk menekan jumlah warga miskin di penjuru wilayahnya.

"Perusahaan yang bergabung dalam forum TSLP dari 32 per 2020, sekarang meningkat sebanyak 93 perusahaan. Meliputi 48 perusahaan yang sudah tergabung di forum TSLP, serta 45 potensial," pungkasnya.

Saat ini, Pemkot Yogyakarta pun sudah memiliki analisis data, sebagai acuan sebaran kemiskinan berbasis kemandirian, mulai dari yang tertinggal, sampai dengan terendah. Dengan begitu, program-program terkait pengentasan kemiskinan yang digulirkan pun bisa tepat sasaran.

Selaras data sebaran ke-

HARUS TEPAT SASARAN

- Pemkot targetkan penurunan angka kemiskinan di angka 7,1 persen pada penghujung 2022.
- Pemkot pun akan menggelontorkan APBD sebesar Rp84.281.675.424.
- Angka kemiskinan semakin melonjak saat pandemi Covid-19.
- Legislatif berharap program pengentasan kemiskinan berjalan efektif.

miskinin berbasis kemandirian, untuk saat ini, yang tertinggal adalah Mergangsan (13 persen). Sedangkan yang terendah ialah Pakualaman (2 persen).

Berikut data lengkap sebaran kemiskinan berbasis kemandirian di Kota Yogya. Yakni, Mergangsan (13% = 6.361 jiwa), Umbulharjo (10% = 4.848 jiwa), Gondokusuman (10% = 4.831 jiwa), Tegalrejo (9% = 4.694 jiwa), Wirobrajan (9% = 4.591 jiwa), Mantrijeron (8% = 3.866 jiwa), Kraton (8% = 3.857 jiwa), Jetis (8% = 3.743 jiwa), Danurejan (7% = 3.370 jiwa), Gedongtengen (5% = 2.469), Kotagede (4% = 1.965 jiwa), Gondomanan (4% = 1.926 jiwa), Ngampilan (3% = 1.353 jiwa), dan Pakualaman (2% = 923 jiwa).

Ia pun tidak memungkir, angka kemiskinan sepanjang pandemi corona mengalami kenaikan yang cukup drastis. Benar saja, setelah sukses menekannya hingga 6,84 persen pada 2019 silam, angka kemiskinan pun mendadak naik signifikan, menyentuh 7,27 persen di akhir 2020.

Belum spesifik

Kalangan legislatif memandang program Pemkot Yogya-

karta belum cukup spesifik untuk mengatasi kemiskinan. Langkah yang muaranya untuk pemberdayaan masyarakat tidak mampu dinilai sangat kurang.

Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardianto, mengatakan, sejauh ini legislatif melihat, kasus kemiskinan di Kota Pelajar lebih didominasi warga yang terimbas fenomena terkini, seperti pandemi Covid-19, sampai masifnya lonjakan harga kebutuhan pokok.

"Kalau hipotesis kami, dibandingkan yang struktural, lebih dominan warga yang menjadi miskin karena suatu proses. Sementara, intervensi Pemkot tidak fokus," urainya.

Setali tiga uang, Wakil Ketua Komisi B, Rifki Lestianto pun menyajikan pandangan serupa. Program Gandeng Gandong yang selalu digembarkan dianggap belum dapat memberi efek pada penurunan angka kemiskinan.

"Sampai sekarang belum efektif, karena seperti tidak ada keseriusan untuk mengawal program ini," cetus Rifki. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005